



LAPORAN LENGKAP

**KUNJUNGAN DELEGASI
GRUP KERJASAMA BILATERAL
(GKSB) KOSTA RIKA
KE KOSTA RIKA**

29 FEBRUARI – 6 MARET 2016



LAPORAN
KUNJUNGAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB)
DPR-RI – PARLEMEN KOSTA RIKA KE KOSTA RIKA
29 FEBRUARI – 6 MARET 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, mempunyai tugas antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) yang juga bertujuan untuk lebih mengoptimalkan hubungan kerjasama antara dua negara di segala bidang. Berdasarkan tujuan tersebut, BKSAP DPR RI mengirimkan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Kosta Rika untuk melakukan kunjungan ke Kosta Rika pada tanggal **29 Februari – 6 Maret 2016**.

B. Dasar Kunjungan

Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Kosta Rika ke Kosta Rika dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 79/PIMP/III/2015-2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Parlemen Kosta Rika ke Kosta Rika dari tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2016.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral ke Kosta Rika adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Parlemen Kosta Rika.
- b. Mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta bidang-bidang lain yang dapat dikembangkan diantara kedua negara.

- c. Melakukan pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama perdagangan Kosta Rika di Indonesia maupun sebaliknya, peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang kerjasama lain di Kosta Rika dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara.

D. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Kosta Rika adalah :

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.	F-PGerindra	Ketua Delegasi
2. Rahmad Handoyo, S.PI, M.M.	F-PDIP	Anggota
3. Drs. Sirmadji, M.Pd.	F-PDIP	Anggota
4. Dr. Ir. Hetifah, MPP	F-PG	Anggota
5. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.	F-PD	Anggota
6. Nurhayati, S.H.	F-PKB	Anggota

II. ACARA DAN HASIL-HASIL KUNJUNGAN

Dalam kunjungan tersebut, Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR-RI – Parlemen Kosta Rika telah mengadakan rangkaian pertemuan dengan berbagai pihak terkait di Kosta Rika, baik dengan pihak Parlemen maupun Pemerintah Kosta Rika.

A. PERTEMUAN DENGAN MENTERI LUAR NEGERI KOSTA RIKA, H.E. MR. MANUEL GONZALES SANZ

Menteri Luar Negeri Kosta Rika, H.E. Mr. Manuel Gonzales Sanz menyampaikan apresiasinya yang besar atas terlaksananya kunjungan Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Kosta Rika ke Kosta Rika. Hal ini dilihat sebagai sinyal positif peningkatan hubungan bilateral Indonesia - Kosta Rika, khususnya mengingat Menteri Luar Negeri kedua negara sebelumnya telah melakukan pertemuan di sela-sela *Forum for East Asia - Latin America Cooperation* (FEALAC) yang diselenggarakan di San Jose, Kosta Rika, pada bulan Agustus 2015.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Kosta Rika, Alejandro Solano Ortiz, juga sudah melakukan kunjungan resminya ke Indonesia untuk menjajaki rencana pembukaan kedutaan besar di Jakarta. Rencana ini pada saat ini tengah melalui tahap administratif. Pembukaan Kedutaan Besar Indonesia akan memberikan nilai positif bagi hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Walaupun perwakilan Indonesia di Kosta Rika sudah dirangkap oleh KBRI Panama City, dampak positif yang dirasakan kedua negara tentunya akan meningkat secara signifikan melalui pembukaan KBRI di Kosta Rika.

Kosta Rika telah berhasil menghasilkan 99% pasokan energi listriknya dari sumber-sumber terbarukan, dan merasa yakin bahwa hal ini dapat terus berlanjut untuk mencapai status bebas karbon pada tahun 2021. Sebagai bagian dari upaya ini, Pemerintah Kosta Rika saat ini tengah melakukan pembaruan sistem manajemen kereta api sebagai upaya efisiensi transportasi umum di Kosta Rika, karena selama ini tingkat emisi karbon dari asap kendaraan bermotor di Kosta Rika masih relatif tinggi.

Selain itu, sebagai negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata aktif, Kosta Rika mengalokasikan anggaran pertahanannya untuk meningkatkan sektor vital lainnya, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia.



GKSB Kosta Rika bersama Menteri Luar Negeri Kosta Rika, H.E. Manuel Gonzales Sanz

Namun demikian, terlepas dari pencapaian positifnya, Kosta Rika juga tengah menghadapi sedikit kemunduran. Yang menjadi permasalahan utama di Kosta Rika adalah defisit fiskal yang telah berjalan selama dua periode pemerintahan. Pada tahun 2015, defisit fiskal mencapai 5,9%, sedangkan pada 2016 angka ini mencapai 6,5%. Untuk itu, Pemerintah dan Parlemen Kosta Rika harus sama-sama melakukan perubahan struktural



Perbincangan di sela-sela pertemuan dengan Menlu Manuel Gonzales Sanz

berskala besar dan bukan hanya perbaikan-perbaikan yang sifatnya kecil atau sementara. Contoh perubahan besar ini adalah pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diluar pajak yang selama ini telah diberlakukan. Selain itu, Kosta Rika juga terus berupaya untuk melakukan diversifikasi mitra investasi diluar Amerika Serikat, dan Indonesia menjadi salah satu prioritas tujuan mitra investasi di Asia. Namun demikian, yang menjadi kekhawatiran Kosta Rika untuk melakukan investasi langsung di Indonesia adalah, terlepas dari rendahnya ongkos produksi barang di Indonesia, harga properti baik rumah maupun kantor di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan di Kosta Rika. Kosta Rika memiliki banyak kantor perwakilan di seluruh dunia. Di Asia saja, Kosta Rika memiliki kedutaan besar di beberapa negara seperti China, Jepang, Korea, dan Singapura. Oleh karena itu, merupakan hal yang lumrah jika Kosta Rika juga memiliki perwakilan di Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi di kawasan Asia.

Yang membuat investor asing tertarik untuk melakukan investasi langsung di Kosta Rika adalah fakta bahwa 90% dari kerja sama perdagangan Kosta Rika dengan negara-negara lain telah dilakukan dibawah kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade*

Agreement/FTA). Beberapa diantara FTA ini diadakan dengan negara-negara di kawasan Amerika Tengah, Eropa, Kolombia, dan China.

Menanggapi permohonan GKSB DPR RI - Parlemen Kosta Rika untuk melakukan pertukaran informasi terkait energi terbarukan dan manajemen bencana, Menlu Kosta Rika menyampaikan bahwa Pemerintah Kosta Rika di lain pihak merasa perlu belajar dari Indonesia tentang sistem perekonomian, terutama terkait sistem ekonomi makro, yang berlaku di Indonesia. Kosta Rika adalah negara berjumlah penduduk kecil dan, oleh karena itu, perekonomiannya difokuskan kepada pasar luar negeri. Sementara itu, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Untuk itu, Kosta Rika ingin belajar bagaimana sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia dapat memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang tentunya sangat tinggi.

Wakil Menteri Luar Negeri Kosta Rika yang turut hadir dalam pertemuan juga menambahkan bahwa Indonesia berminat untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait produksi listrik dari sumber terbarukan, akan lebih baik jika pertukaran kunjungan dilakukan oleh lembaga atau perusahaan penyedia jasa listrik kedua negara sehingga pertukaran informasi dan pengalaman dalam bidang ini dapat terlaksana secara efektif dan lebih konkret.

B. PERTEMUAN DENGAN KOMISI HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PARLEMEN KOSTA RIKA

Pertemuan GKSB Kosta Rika dengan Komisi Tetap Hubungan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Parlemen Kosta Rika dipimpin oleh Ketua Komisi H.E. Mdm. Natalia Diaz Quintana, yang menyambut baik dan merasa bangga akan kedatangan GKSB DPR RI - Parlemen Kosta Rika ke Parlemen Kosta Rika, khususnya menindaklanjuti pertemuan Menteri Luar Negeri kedua negara di sela-sela *Forum for East Asia - Latin America Cooperation* (FEALAC) yang diselenggarakan di San Jose, Kosta Rika, pada bulan Agustus 2015. Komisi LN dan Perdagangan Luar Negeri Kosta Rika mengetahui minat besar kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral dan bekerja sama di bidang-bidang seperti energi baru dan terbarukan, manajemen hutan lestari, dan manajemen bencana. Namun demikian, Komisi merasa bahwa kerja sama di bidang lain seperti sosial dan budaya juga perlu dijajaki untuk lebih mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Untuk itu, Parlemen Kosta Rika siap memberikan persetujuannya atas kesepakatan kerja sama yang diadakan di tingkat eksekutif antara Kosta Rika dan Indonesia.

Anggota Komisi LN Parlemen Kosta Rika, Mdm. Epsy Campbell Barr, memberikan sambutan baiknya atas kunjungan GKSB dan memberikan

saran agar kerja sama diantara kedua parlemen diadakan untuk mencari berbagai upaya dalam menganalisis dan mencari solusi terbaik atas isu-isu yang menjadi perhatian utama masyarakat di kedua negara. Komisi LN sangat mengapresiasi adanya pertukaran kunjungan untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen, namun perlu dipastikan agar hasil kunjungan benar-benar menghasilkan manfaat yang konkret bagi kemajuan bangsa kedua negara. Terkait pertukaran pengalaman, Komisi LN Parlemen Kosta Rika ingin belajar dari Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat tinggi, penghargaan terhadap demokrasi dan nilai-nilai HAM, bagaimana kiat-kiat menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya.

Menanggapi hal ini, Anggota GKSBB Kosta Rika dari Fraksi PDI-P, Sirmadji Tjondropragolo, mengungkapkan bahwa Indonesia berpegangan pada nilai-nilai yang terkandung dalam apa yang dikenal dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang menjamin keharmonisan hidup seluruh warga negara Indonesia yang hidup dengan latar belakang agama, suku, dan bahasa, yang berbeda-beda. Telah menjadi salah satu tugas dari Anggota DPR RI, yang juga merupakan anggota MPR RI, untuk secara rutin menyosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang salah satunya adalah Pancasila.



Anggota GKSBB Kosta Rika dan Anggota Komisi Hubungan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Parlemen Kosta Rika

Anggota Komisi LN Parlemen Kosta Rika, Juan Luis Jiménez Succar, menyampaikan bahwa dirinya sudah pernah berkunjung ke Bali selama dua minggu untuk menghadiri forum *World Legislator Forum*, dan sangat terkesan dengan keindahan pulau dewata itu. Terkait pendalaman pengetahuan bidang produksi listrik tenaga panas bumi (*geothermal*), ia berharap Kosta Rika dapat melakukan transfer pengetahuan dan teknologi untuk diterapkan di Indonesia. Sebagai informasi, ia menyampaikan bahwa Parlemen Kosta Rika baru saja menyetujui anggaran belanja sebesar \$475 juta untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi baru di Kosta Rika. Parlemen akan berupaya semaksimal mungkin memberikan dukungannya kepada pemerintah dalam mencapai berbagai hal yang selama ini telah membawa hasil positif dan menjadi pencapaian bagi negara.

Anggota GKSB Kosta Rika dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengajukan pertanyaan tentang keterwakilan perempuan dalam politik di Kosta Rika karena ia melihat bahwa di Komisi LN saja, Anggota Parlemen perempuan yang hadir jumlahnya cukup seimbang dengan Anggota Dewan laki-laki. Bahkan, Ketua Komisinya pun dijabat oleh Anggota Perempuan yang masih berusia muda dan sangat cerdas. Menanggapi pertanyaan ini, Komisi LN Parlemen Kosta Rika mengungkapkan UU Pemilihan Umum di Kosta Rika menjamin adanya keterwakilan 50:50 antara wakil laki-laki dan perempuan di ketujuh provinsi yang ada di Kosta Rika.

Anggota Komisi LN Parlemen Kosta Rika lainnya, Juan Luis Jiménez Succar, menyampaikan suatu kehormatan bagi dirinya menerima kunjungan dari GKSB DPR RI - Parlemen Kosta Rika. Ia menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran relatif rendah (8.4%) dan memiliki berbagai sektor industri yang serupa dengan Kosta Rika, seperti pertambangan, semen, produk kayu, pariwisata, dll. Oleh karena itu, sangatlah memungkinkan jika kiranya kedua negara mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan. Ia juga merasa sangat puas dengan adanya pertemuan dengan GKSB DPR RI saat ini karena sifatnya yang menindaklanjuti pertemuan resmi yang telah diadakan sebelumnya di tingkat eksekutif. Dengan hubungan antarpemerintahan kedua negara, berbagai proyek kerja sama yang menjadi ketertarikan kedua negara akan semakin memungkinkan untuk terwujud. Parlemen Kosta Rika akan selalu mendukung Pemerintah dalam mewujudkan agenda-agenda kerja sama bilateral dengan Indonesia, khususnya pada bidang yang menjadi minat utama Indonesia, seperti energi baru dan terbarukan serta proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*).

Anggota Komisi LN Parlemen Kosta Rika, Marta Arauz Mora, menyampaikan dirinya berasal dari daerah pemilihan bernama Guanacaste yang berlokasi di bagian Pasifik Kosta Rika. Guanacaste adalah lokasi pengembangan industri *geothermal* terbesar di Kosta Rika. Ia berharap agar Delegasi GKS B Kosta Rika dapat meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Guanacaste untuk melihat secara langsung bagaimana pembangkit listrik tenaga panas bumi ini dikembangkan di Kosta Rika. Disampaikan bahwa Indonesia dan Kosta Rika memiliki perjanjian kerja sama yang cukup besar, khususnya dengan Provinsi Guanacaste, dalam bidang energi terbarukan. Di lain pihak, dengan adanya kemarau panjang, Kosta Rika tengah mengalami kekurangan pasokan air bersih. Untuk itu, Kosta Rika berharap dapat belajar dari Indonesia tentang penerapan teknologi mengubah air laut menjadi air tawar untuk dikonsumsi. Disampaikan pula bahwa, pada dua tahun lalu, ia pernah menghadiri festival budaya di Kosta Rika, yang di dalamnya terlibat 60 orang penari asal Jakarta. Ia sangat terkesan dengan penampilan para peserta yang membawa pesan *Unity in Diversity* (Bhinneka Tunggal Ika) dan melakukan kunjungan ke Kosta Rika selama delapan hari itu.

Sebelum menutup pertemuan, Ketua Komisi LN Parlemen Kosta Rika menyampaikan ucapan belasungkawanya atas peristiwa gempa yang baru-baru saja terjadi di Indonesia. Ia berharap semoga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Terkait peningkatan hubungan bilateral antarparlemen, Ketua Komisi menyampaikan bahwa Komisi LN selalu siap untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan DPR RI kapan pun waktunya dirasakan tepat bagi kedua belah pihak.

C. PERTEMUAN DENGAN KELOMPOK PERSAHABATAN PARLEMEN KOSTA RIKA - INDONESIA

Pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Parlemen Kosta Rika - Indonesia dipimpin oleh Ketua Kelompok Persahabatan, Mdm. Ligia Fallas Rodríguez. Pimpinan rapat menyampaikan merupakan suatu kehormatan untuk menerima kunjungan GKS B Kosta Rika DPR RI, serta harapannya agar pertemuan dapat membuahkan hasil yang bermanfaat dan menjadi awal dari kerja sama yang saling menguntungkan untuk mendukung berbagai program yang berjalan di parlemen kedua negara.

Anggota Kelompok Persahabatan, Maureen Clarke Clarke, menyampaikan sambutannya atas kunjungan GKS B Kosta Rika DPR RI dan harapannya agar terbina hubungan yang kuat diantara kedua parlemen dan kerja sama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan kedua negara dan parlemen. Pertemuan perwakilan negara di tingkat eksekutif juga sebelumnya telah diadakan pada bulan Maret dan Agustus 2015.

Sebuah perjanjian kerja sama telah dihasilkan dalam pertemuan pada tahun 2015 itu dan Kelompok Persahabatan Kosta Rika - Indonesia sangat menantikan untuk dapat mengimplementasikan kerangka kerja sama ini secara nyata. Untuk itu, Kelompok Kerja Sama berupaya untuk berkoordinasi dengan Kadin Kosta Rika untuk menggenjot ekspor impor dengan Indonesia. Mdm. Clarke yang juga merangkap sebagai Ketua Komisi Perempuan di Parlemen Kosta Rika menyampaikan bahwa salah satu poin utama yang menjadi usulan Kosta Rika dalam perjanjian kerja sama itu adalah pembukaan Kedutaan Besar Kosta Rika di Indonesia. Melalui pembukaan kantor perwakilan ini, diharapkan parlemen kedua negara dapat saling bertukar pengalaman dan informasi dalam berbagai bidang yang menjadi ketertarikan satu sama lain. Salah satu isu yang menjadi fokus utama dari pihak Kosta Rika adalah isu keterwakilan perempuan dalam politik.

Ketua delegasi GKSB Kosta Rika DPR RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan ucapan terima kasihnya atas sambutan hangat yang telah diberikan kepada seluruh anggota delegasi. Disampaikan bahwa Badan Kerja Sama Antar Parlemen telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan 49 parlemen negara sahabat sebagai bentuk dukungan parlemen terhadap Pemerintah Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat.



Sesi Foto Bersama dengan Anggota Kelompok Persahabatan Parlemen

Kosta Rika - Indonesia

GKSB Kosta Rika mengharapkan agar pertemuan ini menjadi awal peningkatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang, seperti ekonomi dan perdagangan, pariwisata, dan kebudayaan. Selain itu, parlemen kedua negara juga dapat terus mendorong dibukanya kedutaan besar dan kantor diplomatik di negara satu sama lain. Untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat dan pelaku usaha kedua negara, parlemen juga dapat mendorong pemerintah untuk mengadakan perjanjian bebas visa yang berlaku bukan hanya bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik, tetapi juga paspor hijau.

Ketua GKSB menyampaikan bahwa Indonesia memiliki ketertarikan untuk belajar dari Kosta Rika tentang teknologi pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, khususnya energi panas bumi (geothermal). Selain itu, yang menjadi fokus lain dari Kosta Rika adalah sektor pariwisata, khususnya ekowisata dan pariwisata kesehatan, dan manajemen hutan lestari. Terkait hal ini, GKSB Kosta Rika ingin mendapatkan informasi terkait berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh Parlemen Kosta Rika dalam mendukung Pemerintah Kosta Rika menjalankan berbagai program andalannya.

Menanggapi sambutan dari Ketua GKSB Kosta Rika, Mdm. Ligia Rodriguez menyampaikan mengetahui bahwa Indonesia memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan Kosta Rika. Namun demikian, diakui bahwa Kosta Rika memiliki keunggulan dalam kebijakan bidang lingkungan, serta pembangkit listrik bersumber energi baru dan terbarukan. Di Kosta Rika, yang menjadi sumber utama pembangkit listrik adalah aliran sungai dan panas bumi sebagai negara yang memiliki lebih dari 100 gunung berapi.

Terkait minat dari pihak Indonesia untuk mengadakan kerja sama di bidang pariwisata, disampaikan bahwa Kosta Rika memang negara yang ukurannya cukup kecil tetapi mampu untuk melakukan pertukaran wisatawan dengan Indonesia karena memiliki kebijakan yang cukup baik di bidang pariwisata. Untuk mencapai tujuan ini, serta usulan untuk mendorong pemerintah mengadakan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor hijau, disampaikan bahwa hal ini tentunya akan semakin dipermudah jika pembukaan kedutaan besar Kosta Rika di Jakarta telah terlaksana.

Ketua Kelompok Persahabatan juga menyampaikan sambutan baiknya atas adanya persamaan persepsi kedua belah pihak untuk mengangkat isu penting seperti perlindungan lingkungan dan manajemen bencana. Selain itu, pada tanggal 8 Maret akan diperingati Hari Perempuan Sedunia. Untuk itu, pihak Kosta Rika ingin mengetahui dari perwakilan anggota perempuan GKSB Kosta Rika apa yang menjadi agenda di

Indonesia terkait kesetaraan gender serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

Anggota GKSB dari fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa ia sangat merasa senang mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan pihak Parlemen Kosta Rika, dimana anggota parlemen perempuannya sangat terwakili dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Diakui saat ini Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itulah perlu ada kerja sama untuk terus membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya peka gender. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang menjadi masalah utama bagi kaum perempuan adalah kesehatan dan pendidikan. Masalah utama di bidang kesehatan adalah tingginya angka kematian ibu. Selain itu, yang juga menjadi perhatian banyak pihak adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di bidang politik, tingkat keterwakilan perempuan baru mencapai 18%. Oleh karena itu, kebijakan politik Indonesia di masa depan harus memberikan peluang lebih besar bagi lebih banyak perempuan untuk terpilih karena, dalam pemilihan umum langsung, banyak perempuan yang merasa tidak mampu untuk bersaing dengan politisi laki-laki. Yang diatur dalam kebijakan perpolitikan di Indonesia adalah 30% pencalonan untuk perempuan, bukan *reserved seats* (kursi tetap). Oleh karena itu, Indonesia ingin bertukar pengalaman dengan anggota Kelompok Persahabatan Indonesia - Kosta Rika bagaimana Anggota Parlemen Perempuan bekerja sama dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan dan peka gender. Terkait hal ini, yang menjadi agenda bagi Anggota Parlemen Perempuan di DPR RI dalam rangka Hari Perempuan Sedunia adalah upaya kerja sama yang lebih baik dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang peka gender.

Menanggapi isu kesetaraan gender di Indonesia, pimpinan rapat menyampaikan bahwa sebenarnya Kosta Rika juga masih menghadapi permasalahan yang sama dalam hal ini. Kebijakan tentang kesetaraan gender di Kosta Rika sebelumnya mengatur 40% alokasi untuk perempuan di berbagai sektor pemerintahan, dan dengan kebijakan ini, ada 38% perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan. Namun demikian, ketika kebijakan ini diubah menjadi 50-50 untuk perimbangan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan, angka keterwakilan perempuan justru turun menjadi 33%. Yang menjadi akar permasalahan ini adalah kultur masyarakat Kosta Rika yang masih lebih berorientasi kepada pemimpin laki-laki. Di parlemen sendiri, komisi-komisi juga menjadi salah satu pemicu masalah ketika lebih banyak menempatkan laki-laki sebagai ketua komisi dan perempuan sebagai wakil ketua. Oleh karena itu, walaupun aturan

perbandingan 50:50 untuk anggota laki-laki dan perempuan telah ditetapkan sebagai UU yang sah, hal ini masih sulit untuk diwujudkan.

Menambahkan poin tentang kesetaraan gender, Mdm. Maureen Clarke menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan peranan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, Kosta Rika memiliki Kementerian Bidang Kesetaraan Gender.

Di bidang legislasi, Parlemen Kosta Rika telah menyusun beberapa UU terkait Kesetaraan Gender. Disampaikan bahwa pada tahun '90-an, ada sebuah pergerakan besar dari kaum perempuan yang menyuarakan aspirasinya agar memiliki perwakilan dalam politik. Saat ini, diantara beberapa UU yang terlahir atas aspirasi ini adalah UU Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang memakan waktu 12 tahun sebelum akhirnya disahkan, dan UU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Kesetaraan Gender di Tingkat Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Saat ini juga Parlemen tengah merumuskan 15 - 20 RUU untuk semakin memperkuat sistem hukum di Kosta Rika.

Menanggapi permintaan Ibu Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Partai Golkar terkait salinan beberapa UU kesetaraan gender yang dimiliki oleh Parlemen Kosta Rika, Kelompok Persahabatan Parlemen Kosta Rika menyatakan kesediaannya untuk memberikan salinan beberapa UU dimaksud. Selain dari salinan beberapa UU tentang kesetaraan gender, pimpinan rapat juga menawarkan jika delegasi berkenan untuk menerima beberapa draft RUU yang tengah dibahas oleh Komisi Perempuan Parlemen Kosta Rika dan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi kuota 50:50 antara anggota laki-laki dan perempuan.

Menanggapi isu kesetaraan gender di Indonesia, anggota GKSB dari Fraksi PKB, Nurhayati, SH, menyampaikan bahwa kesetaraan gender di Indonesia belum dapat sepenuhnya terpenuhi karena adanya faktor bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Muslim, yang pada ideologinya menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin.

Pimpinan rapat mengutarakan bahwa topik kesetaraan gender ini memang topik yang sangat menarik bagi Kelompok Persahabatan Kosta Rika - Indonesia karena anggota yang hadir dalam pertemuan adalah juga anggota Komisi Perempuan Parlemen Kosta Rika. Walaupun topik diskusi menjadi cenderung berfokus pada isu perempuan dan gender, Kelompok Persahabatan akan tetap mendukung penuh berbagai program yang menjadi fokus GKSB Kosta Rika, seperti upaya mendorong perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor biasa, peningkatan hubungan bilateral kedua negara, dan pembukaan kedutaan besar Kosta Rika di Indonesia.

D. PERTEMUAN DENGAN KADIN KOSTA RIKA (UCCAEP)

Dalam pertemuan dengan UCCAEP, Ketua GKSB Kosta Rika DPR RI menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan untuk mengadakan pertemuan dengan lembaga yang berfungsi sebagai Kamar Dagang dan Industri di Kosta Rika ini. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kosta Rika, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor perdagangan dan industri memainkan peran utama dalam memajukan perekonomian kedua negara.

Dalam pertemuan dengan KADIN Kosta Rika (UCCAEP), delegasi GKSB Kosta Rika ditemui oleh Ketua UCCAEP, Ronald Jimenez Lara, dan Direktur Eksekutif UCCAEP, Fabio Isaac Masis Fallas. Disampaikan bahwa UCCAEP berperan sebagai lembaga yang menaungi pengusaha dari seluruh sektor perekonomian yang ada di Kosta Rika, seperti industri, perdagangan, pariwisata, perhotelan, perbankan, dan banyak sektor lainnya, yang keseluruhannya mencapai 50 kamar dagang. UCCAEP menjadi lembaga yang menaungi para pelaku usaha atas mandat UU yang telah berlaku di Kosta Rika selama lebih dari 40 tahun. Selain membawahi 50 kamar dagang, UCCAEP juga menaungi 117 anggota dewan direksi dari 75 BUMN yang ada di Kosta Rika. Dengan begitu, hubungan yang terjalin antara sektor publik dan swasta di Kosta Rika sangatlah kuat. Hubungan juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Parlemen Kosta Rika.

Dalam menjalankan tugasnya, jabatan pimpinan UCCAEP sejak pertama kali didirikan telah dipegang oleh pakar dari berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan pertanian. Pimpinan rapat yang menjabat sebagai Ketua UCCAEP saat ini, Ronald Jimenez Lara, adalah seseorang yang memiliki latar belakang bidang teknologi. Keragaman dalam latar belakang pemangku jabatan dalam UCCAEP ini menunjukkan adanya perubahan fokus perekonomian dan keterwakilan sektor yang berbeda-beda di Kosta Rika.



Foto bersama dengan Ketua dan Direktur Eksekutif UCCAEP

Menanggapi sambutan dari Ketua UCCAEP, Ketua GKSBB Kosta Rika, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Daerah Sulawesi Tengah. Ia juga duduk di kepengurusan Real Estate Indonesia (REI), yang merupakan salah satu anggota kehormatan dari KADIN Indonesia. Keanggotaan KADIN Indonesia dan UCCAEP dalam WTO adalah peluang yang baik untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. GKSBB Kosta Rika juga sangat menyambut baik status Kosta Rika sebagai pengawas dalam APEC, dan mengharapkan agar Kosta Rika dapat segera bergabung dalam organisasi ekonomi kawasan Asia Pasifik ini.

Ketua GKSBB juga menyampaikan apresiasinya atas berbagai upaya yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Kosta Rika untuk meningkatkan kerja sama bidang perdagangan diantara kedua negara. Salah satu dari upaya ini adalah kunjungan kenegaraan Wakil Menteri Luar Negeri Kosta Rika, Alejandro Solano Ortiz, ke Indonesia pada tahun 2015 untuk menjajaki kerja sama bidang industri yang mencakup industri tekstil, kelapa sawit, dan spa. Volume perdagangan kedua negara dalam lima tahun terakhir telah mencapai \$27 juta, dan meningkatnya kerja sama kedua negara diharapkan untuk semakin meningkatkan volume perdagangan ini.

Indonesia memandang Kosta Rika sebagai mitra kerja sama yang sangat berpotensi karena berbagai faktor. Kosta Rika adalah negara dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di kawasan Amerika Latin. Secara

ekonomi dan politik, Kosta Rika juga termasuk negara yang cukup stabil di kawasan ini. Selain itu, Kosta Rika juga memiliki kerangka perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara. Hal ini tentunya menjadi faktor utama yang menjamin iklim investasi yang baik. Melalui pertemuan yang diadakan kali ini, GKSB Kosta Rika berharap dapat belajar dari UCCAEP tentang peran lembaga Kadin ini dalam mendukung Pemerintah Kosta Rika mendorong pembangunan ekonomi dalam negeri Kosta Rika.

Anggota GKSB Kosta Rika dari Fraksi PDI-P, Rahmat Handoyo, menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 257 juta jiwa, dan ini adalah pangsa pasar yang sangat besar bagi negara mana pun. Volume perdagangan Indonesia - Kosta Rika saat ini masih berada pada nilai \$27 juta, dan angka ini masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, GKSB Kosta Rika mengharapkan peran aktif UCCAEP dalam meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Terkait hal ini, Indonesia sangat menyambut baik jika kiranya pihak investor dari Kosta Rika berminat untuk melakukan investasi langsung di Indonesia. Selain itu, melihat fakta bahwa komoditas ekspor Kosta Rika ke Indonesia masih didominasi produk gula, ke depannya GKSB Kosta Rika mengajak Kosta Rika melalui UCCAEP untuk meningkatkan ekspor dan impor komoditas lain yang sifatnya saling melengkapi dan tentunya menguntungkan bagi kedua negara.

Pimpinan rapat mengucapkan terima kasih atas masukan dan usul yang diberikan oleh pihak GKSB Kosta Rika. Menutup pertemuan, pimpinan rapat menyampaikan bahwa UCCAEP akan selalu terbuka untuk mengadakan komunikasi lebih lanjut di waktu mendatang untuk terus meningkatkan kerja sama dan hubungan bilateral yang sama-sama memajukan pembangunan ekonomi di kedua negara.

III. PENUTUP

Melalui kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) ini diharapkan kedua belah pihak mendapat masukan dan pandangan mengenai pentingnya kerjasama bagi kedua negara yang perlu ditingkatkan pada masa-masa mendatang serta lebih mengefektifkan pertemuan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi isu – isu global maupun regional sehingga hubungan bilateral antara kedua negara akan senantiasa langgeng dan terbina dengan baik.

Jakarta, Maret 2016

Pelapor,
Ketua Delegasi

Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.